

KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN SRI MULYANI INDRAWATI TERHADAP EKONOMI NASIONAL INDONESIA: STRATEGI DAN TANTANGAN (2016-2024)

Bunga Indriani Azzahra¹, Caritas Nadya Anisti², Dewa Nugraha Handoko³, Aniqotul Ummah⁴

2310413036@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413037@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413039@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Sri Mulyani Indrawati dalam memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional Indonesia selama menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2016–2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, studi ini mengeksplorasi strategi kebijakan fiskal, karakteristik kepemimpinan berbasis data, serta hambatan-hambatan politik dan kelembagaan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka, dokumen resmi pemerintah, serta analisis pemberitaan media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sri Mulyani memiliki peran krusial dalam mendorong reformasi sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi pengeluaran negara, dan merancang program stimulus ekonomi seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi COVID-19. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mampu menjaga stabilitas fiskal dan menunjukkan pemulihan ekonomi, meskipun pendekatannya yang konservatif kerap menuai kritik, khususnya terkait kecepatan respons fiskal. Selain itu, posisinya sebagai satu-satunya pemimpin perempuan dalam sektor keuangan negara memberi makna simbolik terhadap kemajuan representasi gender di ruang pengambilan kebijakan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan teknokratik yang dijalankan oleh Sri Mulyani memberikan dampak signifikan bagi kebijakan fiskal nasional, meski masih menghadapi tantangan struktural yang perlu ditindaklanjuti.

Kata Kunci: Sri Mulyani, Kebijakan Fiskal, Kepemimpinan Perempuan, Gender Dan Politik.

ABSTRACT

This study examines the role of Sri Mulyani Indrawati in influencing the direction of Indonesia's national economic policy during her tenure as Minister of Finance from 2016 to 2024. Using a descriptive-analytical qualitative approach, this study explores fiscal policy strategies, data-driven leadership characteristics, and the political and institutional obstacles faced. Data collection was conducted through literature review, official government documents, and media analysis. The findings reveal that Sri Mulyani played a crucial role in driving tax system reforms, improving government expenditure efficiency, and designing economic stimulus programs such as the National Economic Recovery Program (PEN) during the COVID-19 pandemic. Under her leadership, Indonesia was able to maintain fiscal stability and demonstrate economic recovery, although her conservative approach often drew criticism, particularly regarding the speed of fiscal response. Additionally, her position as the only female leader in the national finance sector holds symbolic significance for the advancement of gender representation in economic policy-making spaces. This study concludes that Sri Mulyani's technocratic leadership style has had a significant impact on national fiscal policy, though it still faces structural challenges that need to be addressed.

Keywords: Sri Mulyani, Fiscal Policy, Female Leadership, Economic Reform, Technocracy.

PENDAHULUAN

Kebijakan makro dan struktur ekonomi serta pemimpin dalam pengelolaan keuangan negara sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Peran Menteri Keuangan

sangat strategis dalam menetapkan kebijakan fiskal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mengatur alokasi sumber daya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang kompleks, baik dalam negeri maupun global. Dalam konteks ini, peran Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sangat menonjol, terutama selama periode 2016–2024, ketika ia menghadapi tantangan besar dalam mengelola ekonomi nasional selama transisi politik, perlambatan ekonomi global, dan pandemi COVID-19.

Dengan latar belakang akademis ekonomi yang kuat dan pengalaman internasional sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani adalah salah satu teknokrat paling berpengaruh di Indonesia. Dalam delapan tahun terakhir, kebijakan ekonomi Indonesia didasarkan pada akuntabilitas fiskal, reformasi kelembagaan, dan gaya kepemimpinan berbasis data (*evidence-based policy*) (Wicaksono, 2022). Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan melakukan banyak reformasi penting, seperti modernisasi sistem perpajakan, peningkatan tata kelola APBN, reformasi belanja negara, dan penajaman program subsidi dan jaminan sosial.

Reformasi perpajakan adalah salah satu strategi utama yang dilakukan. Ini termasuk pembentukan *Tax Amnesty* (2016–2017), digitalisasi sistem pajak melalui sistem inti dan perluasan basis pajak. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah pajak yang rendah yang sudah lama ada di Indonesia. Rasio pajak ini masih di bawah 12% pada 2019, jauh di bawah standar negara berkembang lainnya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga negara tidak lagi bergantung pada pembiayaan utang dan barang ekspor yang rentan terhadap perubahan harga di seluruh dunia.

Selain itu, kepemimpinan Sri Mulyani telah diuji oleh banyak krisis global, terutama pandemi COVID-19. Salah satu program stimulus fiskal terbesar di Indonesia, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dirancang dan dijalankan olehnya. Belanja untuk sektor kesehatan, bansos, bantuan kepada usaha kecil dan menengah, serta insentif pajak dan dukungan terhadap dunia usaha adalah semua bagian dari program ini. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan pengangguran (Sihombing, 2021). Hasilnya, Indonesia termasuk negara dengan pemulihan ekonomi tercepat di Asia Tenggara, meskipun mengalami kontraksi ekonomi sebesar -0,207 persen pada 2020. Namun, pertumbuhannya kembali positif sebesar 3,69% pada 2021 dan meningkat lagi pada 2022.

Gaya kepemimpinan Sri Mulyani masih dikritik. Beberapa orang menganggap pendekatan ini terlalu konservatif secara fiskal, terutama ketika anggaran perlu diperbesar, seperti pada awal pandemi. Selain itu, dominasi politik dalam proses penganggaran dan resistensi birokrasi terhadap modernisasi sistem keuangan negara sering menjadi hambatan bagi pelaksanaan reformasi struktural yang berkelanjutan (Prasetya, 2020). Selain itu, ada masalah seperti ketimpangan antar wilayah, penyerapan anggaran yang buruk di daerah, dan peningkatan utang akibat kebijakan *counter-cyclical* selama pandemi.

Dari perspektif gender dan politik, keberadaan Sri Mulyani memiliki arti yang signifikan dan simbolis. Ia menjadi representasi penting dari kepemimpinan perempuan di ruang kebijakan ekonomi yang masih sangat maskulin dan elitis karena ia berada di posisi penting dalam pemerintahan. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam sistem kekuasaan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan publik yang berdampak besar pada jutaan warga negara (Santoso, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati membantu mengarahkan dan menavigasi ekonomi Indonesia dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang berbasis tata kelola

yang baik. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil makroekonomi itu juga melihat cara-cara, masalah, dan aspek politik serta kelembagaan yang mempengaruhi kepemimpinannya selama periode 2016–2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis terhadap studi kebijakan fiskal dan kepemimpinan publik. Selain itu, akan menjadi referensi praktis untuk membangun model kepemimpinan ekonomi masa depan yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji kontribusi kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati terhadap ekonomi nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan ekonomi nasional Indonesia yang kompleks. Metode ini memungkinkan analisis komprehensif mengenai karakteristik kepemimpinan, implementasi kebijakan, serta dampaknya dalam konteks politik dan gender.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal akademik, buku teks, publikasi resmi pemerintah, laporan kebijakan ekonomi, dan dokumen-dokumen resmi Kementerian Keuangan. Fokus studi literatur adalah pada artikel-artikel yang membahas kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati terhadap ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen kebijakan fiskal dan ekonomi yang dikeluarkan selama masa kepemimpinan Sri Mulyani, termasuk APBN, laporan kinerja Kementerian Keuangan, peraturan perpajakan, serta kebijakan pengelolaan utang negara.

Analisis media juga dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis pemberitaan media terkait kebijakan dan kepemimpinan Sri Mulyani dari berbagai sumber media nasional dan internasional selama periode 2016-2024. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi persepsi publik dan stakeholder terhadap kepemimpinan Sri Mulyani serta respons terhadap kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakter Kepemimpinan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati merupakan figur sentral dalam ekonomi Indonesia yang dikenal berkat latar belakang akademik dan profesionalnya yang solid. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan pascasarjana hingga meraih gelar Ph.D. di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pengalamannya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia sebelum kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan menambah kekayaan perspektif globalnya dalam mengelola ekonomi nasional. Sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi Menteri Keuangan di Indonesia, Sri Mulyani tidak hanya menjadi simbol kemajuan gender dalam birokrasi, tetapi juga menghadirkan pendekatan kebijakan yang berbasis data dan tata kelola modern (Yusdianto, 2022). Citra kepemimpinan Sri Mulyani dalam konteks gender sangat strategis karena ia mampu mematahkan stereotip tradisional tentang dominasi laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan strategis negara. Menurut penelitian Rahmawati (2020), gaya kepemimpinannya yang tegas namun inklusif menjadikannya sosok yang dihormati baik secara internal dalam birokrasi maupun secara eksternal oleh pelaku ekonomi dan lembaga internasional. Hal ini sejalan dengan temuan Putri (2019) bahwa posisi Sri Mulyani dalam sistem politik-ekonomi nasional menjadi bukti penting atas kapasitas perempuan dalam memainkan peran vital dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Strategi Kebijakan Ekonomi di Era Sri Mulyani

Strategi Kebijakan Ekonomi	Hasil Yang Dicapai	Sumber
<p>Reformasi Struktural dan Transformasi Ekonomi, focus pada investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), penyederhanaan regulasi dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.</p>	<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan target pertumbuhan mencapai 8%. Menkeu menekankan pentingnya investasi yang kuat, mendekati 7 – 8% , untuk mencapai target tersebut.</p>	<p>Bloomberg Technoz (2024, 29 Februari). Sri Mulyani beberkan strategi capai target pertumbuhan ekonomi 8% Bloomberg Technoz.</p>
<p>Efisiensi Belanja Negara melakukan refocusing anggaran ke sektor - sektor dengan efek pengganda tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Meskipun terjadi efisiensi, total belanja negara tetap sesuai dengan APBN 2025, Menkeu memantau dampak efisiensi terhadap perekonomian dan menekankan pentingnya realisasi belanja yang cepat untuk hasil positif</p>	<p>Kontan Nasional. (2024, 13 Februari). Sri Mulyani pantau dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian. Kontan.</p>
<p>Transisi Energi sebagai Strategi Ekonomi Jangka</p>	<p>Merumuskan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan</p>	<p>Antara News. (2024, 1 Maret). Sri Mulyani:</p>

Sejak kembali menjabat pada tahun 2016, Sri Mulyani menerapkan berbagai strategi kebijakan ekonomi yang bertumpu pada prinsip kehati-hatian fiskal dan efisiensi anggaran. Salah satu langkah besar adalah reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Program amnesti pajak pada 2016 berhasil menarik deklarasi harta senilai lebih dari Rp4.800 triliun (Wulandari, 2021). Kebijakan ini meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan memperkuat pembiayaan pembangunan. Dalam hal efisiensi anggaran, Sri Mulyani menerapkan

penghematan belanja negara, termasuk digitalisasi birokrasi yang berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp161 miliar (Yusdianto, 2022). Strategi pengelolaan utang juga menjadi fokus utama. Ia menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 60% sebagai batas aman, sambil memanfaatkan instrumen utang untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani memimpin kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi bantuan sosial, insentif usaha, dan dukungan untuk UMKM. Total anggaran PEN mencapai lebih dari Rp695 triliun yang disalurkan secara bertahap (Wulandari, 2021). Menurut Handayani (2022), strategi ini membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi selama masa krisis.

Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Stabilitas Makro dan Sektor Publik

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Sri Mulyani membawa dampak nyata terhadap stabilitas makro dan sektor publik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat akibat pandemi mulai pulih pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,69%, meningkat menjadi 5,31% pada 2022. Penerimaan negara juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan dari sektor pajak. Namun, tantangan tetap ada. Utang negara meningkat hingga Rp7.000 triliun pada akhir 2022, meskipun masih dalam batas aman. Ketimpangan fiskal antar daerah dan daya beli masyarakat yang menurun akibat inflasi menjadi perhatian utama. Menurut Indrawati, Kuncoro, dan Ikhsan (2019), keberlanjutan kebijakan ekonomi sangat tergantung pada kredibilitas pemimpin dan konsistensi pelaksanaan reformasi.

Tantangan dalam Kepemimpinan Ekonomi Sri Mulyani Indrawati

Meskipun kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan mendapatkan banyak apresiasi atas stabilitas fiskal dan kemajuan reformasi struktural, berbagai tantangan signifikan tetap membayangi, baik dari sisi ekonomi makro, politik, maupun kelembagaan. Tantangan paling nyata muncul dari lonjakan utang negara yang meningkat tajam selama pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan fiskal ekspansif, menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar untuk membiayai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meskipun langkah ini berhasil mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam, konsekuensinya adalah beban bunga utang yang membengkak dan menyerap porsi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga akhir 2024, total utang pemerintah mencapai lebih dari Rp8.000 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 40%. Sejumlah pengamat menyebut bahwa meski rasio ini masih berada dalam batas aman, struktur utang Indonesia cenderung mahal karena yield SBN yang relatif tinggi dibandingkan negara tetangga, sehingga menekan ruang fiskal untuk belanja produktif (DDTC News, 2024).

Selain itu, reformasi perpajakan yang menjadi prioritas Sri Mulyani juga menghadapi kendala struktural. Penerapan sistem administrasi baru seperti core tax system memang menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi masih banyak hambatan implementatif di lapangan. Banyak kantor pajak di daerah yang belum optimal dalam menggunakan sistem digital ini karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Di sisi lain, meskipun upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terus dilakukan, penghindaran pajak (tax avoidance) oleh kelompok kaya dan korporasi besar masih menjadi masalah serius yang belum tersentuh secara struktural. Menurut laporan Alinea.id (2019), beban pajak di Indonesia justru lebih banyak ditanggung oleh kelompok menengah ke bawah melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara kelompok atas sering lolos dari pengawasan efektif.

Kebijakan fiskal yang dianggap terlalu konservatif juga menuai kritik, terutama di masa awal pandemi ketika pemerintah dinilai lambat dalam menyalurkan anggaran

stimulus. Sikap hati-hati Sri Mulyani dianggap berdampak pada penundaan realisasi bantuan sosial dan insentif kepada pelaku usaha kecil. Kritik ini salah satunya dilontarkan oleh ekonom senior Faisal Basri yang menyebutkan bahwa pendekatan fiskal Indonesia kurang agresif dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam (Inilah.com, 2024). Di samping itu, dominasi politik dalam proses penyusunan anggaran nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah kebijakan yang seharusnya berbasis pertimbangan teknokratik seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik dari elite partai atau aktor-aktor legislatif, sehingga melemahkan independensi institusi fiskal dalam menentukan prioritas pembangunan (RMOL, 2025).

Reformasi birokrasi yang diusung Sri Mulyani dalam lingkungan Kementerian Keuangan pun belum merata. Walaupun kementerian ini dikenal sebagai institusi yang relatif lebih maju dibanding kementerian lain, beberapa unit masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama dalam konteks akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Sebagian birokrat lama masih mempertahankan pola kerja tradisional yang tidak selaras dengan semangat efisiensi dan integritas yang ingin dibangun. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan struktural; dibutuhkan pula perubahan budaya kerja secara menyeluruh yang tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

Tantangan lainnya yang bersifat politis adalah munculnya spekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri atau pergantian posisi Sri Mulyani menjelang pemilu 2024. Hal ini dipicu oleh tekanan politik dari partai-partai tertentu yang ingin memasukkan tokoh baru ke dalam kabinet. Tekanan semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas kebijakan fiskal yang telah dirancang secara konsisten, tetapi juga dapat menimbulkan sentimen negatif di pasar dan menurunkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan reformasi ekonomi nasional (RMOL, 2025). Ketidakpastian ini menjadi refleksi dari ketegangan antara logika politik jangka pendek dan kebutuhan akan kebijakan ekonomi jangka panjang yang stabil dan kredibel.

Di luar aspek teknis dan kebijakan, Sri Mulyani juga menghadapi tantangan yang bersumber dari dimensi gender. Sebagai satu-satunya perempuan yang menjabat posisi sentral dalam pengelolaan ekonomi negara, ia kerap menjadi sasaran bias struktural dan ekspektasi ganda. Di satu sisi, ia diharapkan menjalankan peran profesional sebagai teknokrat; di sisi lain, publik dan media tidak jarang mengaitkan keberhasilannya dengan narasi simbolik “perempuan tangguh,” yang kadang justru membatasi pembacaan objektif atas kebijakan-kebijakannya. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap dirinya lebih sering bersifat personal atau stereotipikal dibanding terhadap substansi kebijakan fiskal yang ia usung. Misalnya, ketika menghadapi tekanan politik atas keputusan kenaikan PPN atau realokasi subsidi, sentimen terhadap kepemimpinannya sebagai “perempuan” menjadi sorotan media yang seharusnya tidak relevan dalam konteks evaluasi teknokratis. Menurut Santoso (2023), tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan di sektor ekonomi bukan hanya pada beban kerja atau ekspektasi kinerja, melainkan juga pada bagaimana sistem sosial dan politik mempersepsikan otoritas mereka. Dengan demikian, Sri Mulyani tidak hanya memikul beban sebagai pengelola fiskal negara, tetapi juga sebagai representasi simbolik perempuan dalam ruang kekuasaan yang masih sangat maskulin.

Refleksi dan Prospek Kepemimpinan Ekonomi di Indonesia

Kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati sepanjang 2016–2024 mencerminkan keberhasilan teknokratis dalam menavigasi ekonomi nasional di tengah tekanan global dan domestik. Ia berhasil menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi melalui kebijakan berbasis data dan efisiensi anggaran, terutama saat pandemi COVID-19. Sri Mulyani tidak hanya memimpin pengelolaan anggaran terbesar sepanjang sejarah

Indonesia, tetapi juga menekankan bahwa instrumen fiskal harus menjadi pelindung rakyat serta katalis pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketahanan ekonomi jangka panjang (Reuters, 2025). Refleksi terhadap gaya kepemimpinannya menunjukkan bahwa pendekatan teknokratik yang ia anut efektif dalam menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Namun, gaya ini juga membawa tantangan tersendiri. Sejumlah ekonom menilai bahwa Sri Mulyani terlalu konservatif dalam belanja negara, yang membuat stimulus ekonomi tidak cukup agresif saat dibutuhkan, seperti pada awal pandemi (Tempo, 2024). Di sisi lain, pendekatan yang sangat terfokus pada angka dan stabilitas kadang dinilai mengabaikan pendekatan sosial-politik yang lebih transformatif, seperti redistribusi ekonomi yang adil atau inovasi perlindungan sosial berbasis komunitas.

Dari segi prospek, pemerintahan ke depan menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan reformasi fiskal di tengah tekanan defisit, utang, dan perlambatan global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,8% pada 2026, dan bahkan 8% pada 2029, tetapi banyak pihak menilai proyeksi ini ambisius jika tidak dibarengi reformasi struktural yang menyeluruh (The Jakarta Post, 2024). Agenda seperti pembenahan subsidi energi, pendalaman pasar keuangan, serta perluasan basis pajak menjadi krusial. Selain itu, prioritas fiskal di bidang pendidikan dan kesehatan harus benar-benar direalisasikan bukan hanya sebagai jargon, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan kelas menengah baru yang tangguh dan produktif.

Refleksi penting lainnya menyangkut representasi gender dalam kepemimpinan ekonomi. Sri Mulyani menjadi ikon penting dalam representasi perempuan di sektor publik. Namun, tantangan yang ia hadapi juga memperlihatkan bias struktural yang masih ada dalam dunia kebijakan ekonomi. Beberapa kritik yang diarahkan kepadanya bersifat personal atau stereotipikal, berbeda dari kritik terhadap menteri laki-laki yang lebih banyak menasar substansi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun representasi telah tercapai, penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan masih dibatasi oleh konstruksi sosial yang patriarkal. Ke depan, penting bagi negara untuk menciptakan ekosistem yang membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk berkibar dalam bidang ekonomi bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengambil kebijakan sejati yang kredibel dan berdampak.

Dengan demikian, kepemimpinan Sri Mulyani meninggalkan warisan penting dalam tata kelola fiskal nasional, tetapi juga menyisakan pekerjaan rumah besar: memperluas cakupan reformasi agar lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Tantangan ekonomi masa depan mulai dari transisi energi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi membutuhkan pemimpin ekonomi yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mampu memahami dinamika sosial dan membangun kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati selama menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode 2016–2024 telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong reformasi ekonomi nasional. Strategi kebijakan yang diterapkan, seperti reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, pengelolaan utang yang hati-hati, serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Gaya kepemimpinan teknokratik berbasis data yang diterapkan oleh Sri Mulyani turut memperkuat kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai institusi yang responsif dan akuntabel. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti meningkatnya utang negara,

resistensi birokrasi terhadap reformasi, serta kritik terhadap pendekatan fiskal yang dianggap terlalu konservatif dalam kondisi darurat. Di samping itu, peran Sri Mulyani juga mencerminkan pentingnya representasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan strategis, meskipun ia tetap menghadapi bias gender dalam ruang publik dan politik. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan model kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan inklusif. Ke depan, kesinambungan reformasi fiskal dan penguatan peran pemimpin perempuan menjadi aspek krusial untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Sulaeman, H. A. N., Lutfiani, D. N., Deswita, S. A., & Trysnio, L. E. (2024). PERAN GAYA KEPEMIMPINAN SRI MULYANI INDRAMATI DALAM UPAYA PERWUJUDAN STABILITAS KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).
- Darmawan, I. (2020). Kritik terhadap Kebijakan Fiskal Konservatif di Indonesia: Studi Kasus Anggaran 2018–2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Politik*, 7(1), 33–48.
- Fauzi, M. Q., & Al Insany, M. A. (2019). Konsep Ekonomi Politik dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 6(1), 154–169.
- Febriharini, M. P. (2016). Penerapan Good Governance dalam Membangun Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(1).
- Hidayat, S. (2018). Menimbang ulang konsep good governance: diskursus teoretis. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 151-165.
- Ikhsan, M., Indrawati, S. M., Virananda, I., & Abdi, Z. (2021). The Productivity and future growth potential of Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(2), 6.
- Maherul, M. (2019). Mengenal Ekonomi Politik: Definisi, Posisi Negara, dan Pasar. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. Univ of California Press.
- Prasetya, A. (2020). Digitalisasi Fiskal dan Tantangan Birokrasi: Studi Implementasi DJP Online di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 22–37.
- Purba, B., Simanjuntak, T., & Manurung, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*.
- Sihombing, R. (2021). Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Menangani Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 89–104.
- Wicaksono, A. (2022). Kepemimpinan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi: Studi terhadap Peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–60.
- Santoso, R. (2023). Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Tata Kelola Ekonomi: Studi Kasus Sri Mulyani. *Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Negara*, 11(1), 21–35.
- Alinea.id. (2019, 11 Februari). Menyoal Respons Sri Mulyani terhadap Kritik. Diakses dari <https://www.alinea.id>
- Antara News. (2024, 1 Maret). Sri Mulyani: Transisi energi jadi strategi ekonomi jangka panjang. Diakses dari <https://www.antaraneews.com>
- Bloomberg Technoz. (2024, 29 Februari). Sri Mulyani beberkan strategi capai target pertumbuhan ekonomi 8%. Diakses dari <https://www.bloombergentechnoz.com>
- DDTC News. (2024, 2 Desember). Ekonomi Stabil, Sri Mulyani Ungkap Defisit dan Utang RI Terjaga Rendah. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id>
- Handayani, R. (2022). Strategi Fiskal dan Ketahanan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Publik Indonesia*, 10(2), 55–67.
- Indrawati, S. M., Kuncoro, M., & Ikhsan, M. (2019). *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang Pasca Krisis Global*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Inilah.com. (2024). Catatan Kegagalan Menkeu Sri Mulyani. Diakses dari <https://www.inilah.com>
- Kontan Nasional. (2024, 13 Februari). Sri Mulyani pantau dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id>
- Putri, S. A. (2019). Perempuan dalam Sistem Fiskal: Analisis Peran Sri Mulyani. *Jurnal Kepemimpinan Ekonomi*, 4(1), 45–58.
- Rahmawati, D. (2020). Gaya Kepemimpinan Inklusif dalam Pemerintahan Ekonomi: Studi Kasus Sri Mulyani Indrawati. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 22–34.
- Reuters. (2025, 20 Mei). Indonesia to boost social spending under budget reforms, says finance minister. Diakses dari <https://www.reuters.com>
- RMOL. (2025, 20 Maret). Sri Mulyani Lengser, Intrik Politik dan Krisis Ekonomi. Diakses dari <https://rmol.id>
- Santoso, R. (2023). Kepemimpinan Perempuan dan Reformasi Tata Kelola Ekonomi: Studi Kasus Sri Mulyani. *Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Negara*, 11(1), 21–35.
- Tempo.co. (2024). Ekonom Kritik Konservatisme Fiskal Sri Mulyani di Tengah Pandemi. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- The Jakarta Post. (2024). Analysis: Can Indonesia Achieve 8 Percent Growth by 2029?. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com>
- Wulandari, M. (2021). Reformasi Fiskal dan Ketahanan Ekonomi: Studi Dampak Amnesti Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–116.
- Yusdianto, A. (2022). Kepemimpinan Sri Mulyani dalam Transformasi Digitalisasi Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 8(1), 88–97.